



SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH



**IWAN KURNIAWAN, ST, MM,
PIt. DIREKTUR PEIPD**

DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH, KEMENDAGRI





01

KEBIJAKAN SIPD





Dasar Hukum SIPD

PERMENDAGRI 70/2019 SIPD

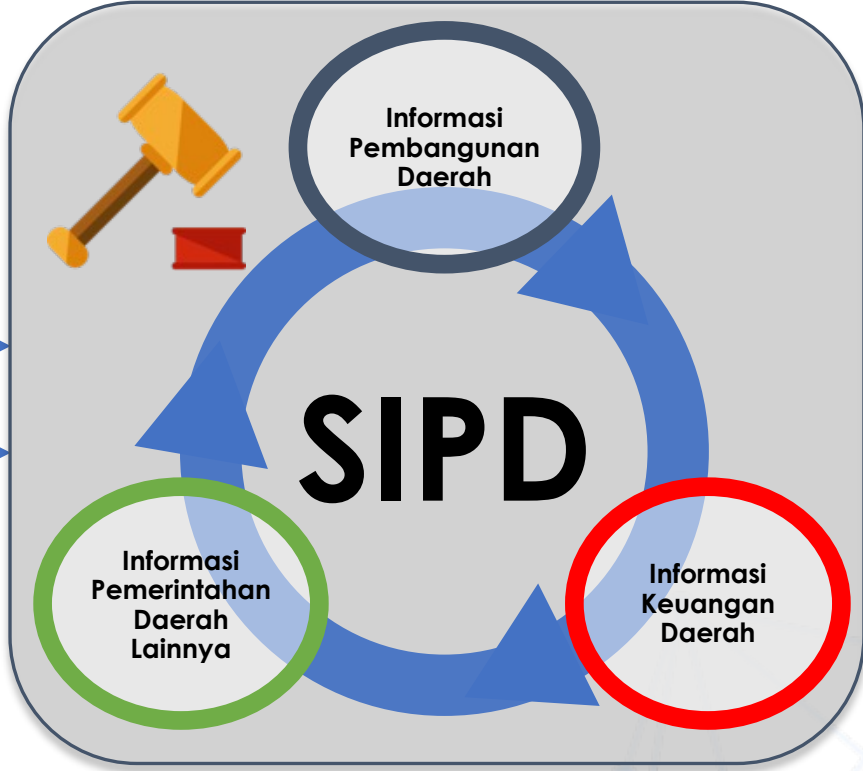
UU 23/2014 PEMDA

PASAL 274
Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang **dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pembangunan Daerah.**

PASAL 391 - 395
Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yg terdiri atas **informasi pembangunan Daerah, informasi keuangan Daerah, informasi pemerintahan daerah lainnya** yang dikelola dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

PERPRES 54/2018 STRANAS PK

Integrasi **sistem perencanaan dan penganggaran** berbasis elektronik



PERPRES 95/2018 SPBE

PASAL 7
Arsitektur SPBE Nasional bertujuan untuk menghasilkan **Layanan SPBE yang terpadu** secara nasional

PERPRES 39/2019 SATU DATA INDONESIA

PASAL 2
Satu Data Indonesia bertujuan untuk memberikan acuan Instansi Pusat dan instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan **tata kelola Data**

KONSIDERAN MENIMBANG 70/2019 SIPD
Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat dalam rangka memberikan kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat. Informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas: informasi pembangunan Daerah; informasi keuangan Daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya



SIPD SEBAGAI TOOL PEMBINAAN





Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : BI 9206 /KSP.00/10-16/12/2018
Sifat : Segera
Lampiran : Dua Lembar
Perihal : Penyampaian Kesimpulan Hasil Rapat tanggal 6 Desember 2018

Desember 2018

Kepada Yth
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri RI
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Sehubungan hasil rapat Harmonisasi Aplikasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Gedung KPK pada tanggal 6 Desember 2018 yang dihadiri oleh beberapa Kementerian dan Lembaga, berikut kami sampaikan dokumen hasil keputusan rapat.

Sebagaimana tercantum dalam kesimpulan, salah satu dari kesimpulan hasil rapat tersebut adalah pembentukan Tim Harmonisasi Aplikasi yang akan bekerja selama 2 (dua) bulan yang akan melakukan harmonisasi aplikasi dan kebijakan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Untuk itu, kami meminta Saudara untuk menunjuk Direktur terkait untuk menjadi anggota Tim Harmonisasi dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan
Deputi Pencegahan
Bahak Mainggolian

Tembusan :

1. Yth. Pimpinan KPK
2. Yth. Deputi Bidang PIPM

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Jalan Kuningan Persada Kav.4 Setiabudi, Jakarta Selatan 12960
Telp. +62 21 25678300, Faks. +62 21 25678333.
<http://www.kpk.go.id>

Kesimpulan Rapat Harmonisasi Aplikasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
Di Ruang Rapat Gedung KPK, 6 Desember 2018

1. Akan dibangun/dikembangkan sistem keuangan yang mencakup e-planning, e-budgeting dan pelaporan keuangan yang terintegrasi antara desa/kelurahan, kabupaten/kota provinsi dan pusat dengan mengacu ke Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. BPPT (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi) ikut mengawasi pembangunan/pengembangan sistem tersebut.
3. Implementasi aplikasi E-planning Kemendagri di 171 Pemda selesai Desember 2018, dan bulan Desember 2019 selesai implementasi untuk seluruh pemda sisanya.
 - a. Aplikasi terpadu dengan e-budgeting.
 - b. Aplikasi terkoneksi dengan Krisna
 - c. Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar Biaya (ASB) terintegrasi dalam aplikasi perencanaan tersebut.
4. Implementasi E-budgeting Kemendagri selesai Juni 2019.
 - a. Aplikasi terkoneksi dengan Sinergi SIKD
 - b. Menggunakan Bagan Akun Standar (BAS) (sesuai PP BAS yang akan keluar Juni 2019)
5. Tim Harmonisasi akan :
 - a. Memutuskan mana yang akan melakukan konsolidasi data keuangan daerah.
 - b. Mengidentifikasi laporan yang redundan.
 - c. Mengidentifikasi regulasi yang tumpang tindih.
6. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengembangkan Sistem Informasi Keuangan Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Saat ini PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sedang direvisi.
7. Semua pengembang aplikasi di tiap Kementerian/Lembaga/Daerah agar melaporkan meta data yang ada di aplikasinya sebagai bahan untuk Tim Stranas untuk menyusun sinerginya.
8. Tim Harmonisasi akan bekerja selama dua (2) bulan, terdiri:
 - a. Tim STRANAS (Koordinator)
 - b. Bappenas: Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan, Pusat Data dan Informasi
 - c. BPPT: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Direktorat Pusat Sistem Audit Teknologi (PSAT)
 - d. BPKP: Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wil III.
 - e. Kemdagri: Ditjen Bangda, Ditjen Keuangan Daerah, Ditjen PemDes, dan Ditjen Adwil.
 - f. Kemenkeu: Ditjen Perimbangan Keuangan, Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan.
 - g. Kemkominfo: Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan.
 - h. Kemenpan RB: Asisten Deputi Perumusan Kebijakan E-Gov
9. Output Tim Harmonisasi
 - a. Laporan assesmen yang berisi :
 - i. Bisnis Proses pertukaran data,
 - ii. Bagan Akun Standar dan standar nomenklatur Program/Kegiatan (arsitektur data dan informasi)
 - iii. Infrastruktur yang harus disediakan
 - iv. Kamus data/istilah dan meta data yang digunakan
 - b. Usulan regulasi pertukaran data.



www.kemendagri.go.id



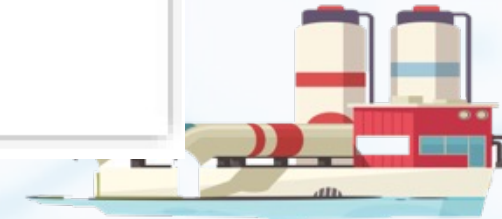
Kemendagri_RI



Kemendagri

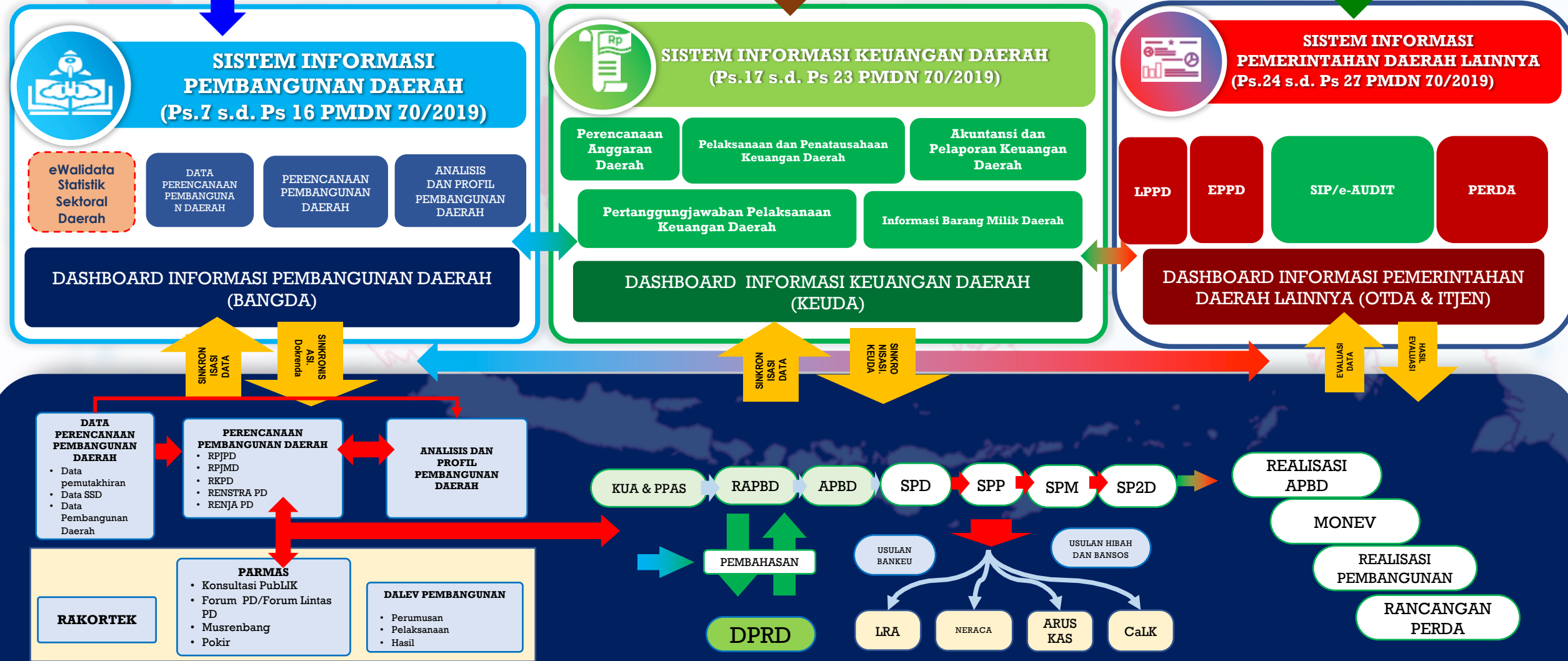


Kemendagri





ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH





Sistem Informasi
Pembangunan Daerah

Ps.7

Ps.7 Ay.1a

Ps.7 Ay.1c

Ps.7 Ay.1b

eWalidata Statistik
Sektoral Daerah

Data Perencanaan
Pembangunan Daerah

Perencanaan
Pembangunan Daerah

Analisis dan Profil
Pembangunan Daerah

RanPermendagri ttg
Statistik Sektoral
Daerah

Saat ini sudah dirancang Kesepakatan Bersama antara Menteri PAN RB dan Mendagri untuk menjadikan SIPD sebagai sistem informasi/aplikasi umum bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Data (statistik sektoral daerah), perencanaan, serta analisis dan profil pembangunan daerah menjadi sebagian menu utama yang akan disajikan.





02

LANGKAH STRATEGIS PENGELOLAAN & PENGEMBANGAN STATISTIK SEKTORAL DAERAH & DATA PERENCANAAN SIPD





Landasan Hukum Pengelolaan Statistik Sektoral dan Penguatan Walidata

UU 16/1997 PP 51/1999

- Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (UU 16/1997)
- Dilakukan instansi pemerintah sesuai tugas dan fungsi (PP 51/1999)

UU 23/2014

- Urusan Statistik dan Urusan Komunikasi dan Informatika menjadi urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.
- Terdapat pembagian kewenangan yang jelas bagi provinsi dan kab/kota dalam urusan statistik dan statistik sektoral.

Perpres 39/2019 Per BPS 4/2019

- Statistik sektoral bagian dari penyelenggaraan SDI.
- Penyelenggaraan Statistik Sektoral terdiri dari perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data (Perka BPS)
- Penyelenggara satu data adalah Pembina, walidata, dan produsen data.

Permendagri 70/2019

- Menegaskan Lembaga pelaksana Walidata pada urusan statistik.
- Walidata adalah unit pada instansi pusat dan perangkat daerah yang membidangi urusan statistik melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.

Permendagri 18/2020

- LPPD melaporkan kinerja (IKK) outcome dan output.
- IKK outcome urusan statistik adalah penggunaan data statistik dalam perencanaan sampai evaluasi pembangunan.
- Beberapa IKK outputnya adalah buku profil daerah; jumlah survey dan kompilasi statistik sektoral yang dilakukan dan yang mendapat rekomendasi BPS; kelengkapan metadata statistik.

Permen PPN/ Bappenas 18/2020

- Hubungan dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat pusat dan tingkat daerah diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.



Pengaturan dalam Rapermendagri

RAPERMENDAGRI TENTANG STATISTIK SEKTORAL DAERAH

Bab II Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD)

Mengatur mekanisme penetapan dan penambahan daftar data SSD sebagai pedoman Pemda untuk menyelenggarakan SSD

(Pasal ...)

Bab III Penyelenggara Statistik Sektoral Daerah (SSD)

Mengatur instansi yang berperan dalam penyelenggaraan SSD disertai dengan tugas dan fungsi masing-masing Instansi

(Pasal ...)

Bab IV Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah (SSD)

Mengatur proses penyelenggaraan SSD yang disertai dengan penanggungjawab, pedoman, dan keluaran dari masing-masing tahapan

(Pasal ...)

Bab V Sistem Informasi Statistik Sektoral Daerah (SISSD)

Mengatur penggunaan SISSD yang dimulai dari penetapan dari penambahan daftar Data SSD dan setiap proses penyelenggaraan SSD

(Pasal ...)

Bab VI Pembinaan dan Pengawasan

Mengatur terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SSD dan terkait dengan evaluasi penyelenggaraan SSD

(Pasal ...)

Bab VII Pendanaan

Mengatur terkait pendanaan penyelenggaraan SSD sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan

Pasal (...)



DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)

DEFINISI

DSSD adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan (DSSD ditetapkan dengan mempedomani Prinsip Satu Data Indonesia)

STRUKTUR DAFTAR DSSD

DAFTAR DSSD INDUK (DATA DASAR)

- **Daftar data keseluruhan** yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan SSD
- Data SSD Induk dilakukan penambahan berdasarkan (Perkembangan Kebijakan, Usulan K/L, dan Usulan Pemda)
- **Daftar DSSD Induk disusun dan ditetapkan di dalam SISSD**

DAFTAR DSSD PRIORITAS

- Daftar data yang **harus dikumpulkan** oleh Pemda setiap tahunnya berdasarkan kebutuhan sinkronisasi perencanaan pembangunan
- Setiap Data SSD Prioritas merupakan pemilihan terhadap Data SSD Induk
- **Daftar DSSD Prioritas disusun dan ditetapkan di dalam SISSD**

DAFTAR DSSD PENUGASAN

- Daftar data yang sifatnya **kontekstual** berdasarkan kebutuhan dan jangka waktu tertentu sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah
- Setiap data penugasan akan menjadi tambahan data dalam Data Induk
- **Daftar DSSD Penugasan disusun dan ditetapkan di dalam SISSD**



Penyelenggara SSD

Struktur Penyelenggara SSD

- 1. Pembina Umum SSD → Mendagri**
Tugas: Pembinaan dan Pengawasan umum penyelenggaraan SSD
- 2. Pembina Data SSD → BPS**
Tugas: Pembinaan teknis penyelenggaraan SSD
- 3. Walidata SSD → Diskominfo**
Tugas: memeriksa kualitas data berdasarkan prinsip SDI dan membantu tugas Pembina Data
- 4. Walidata pendukung SSD → OPD**
Tugas: membantu tugas walidata SSD
- 5. Produsen data SSD → OPD**
Tugas: menghasilkan dan menyampaikan data serta saran terhadap standar, metadata, dan Interoperabilitas Data

Forum SSD Tingkat Prov dan Kab/Kota

1. Pembina data: BPS
2. Walidata SSD: Diskominfo
3. Walidata Pendukung SSD: OPD
4. Produsen Data: OPD
5. Koordinator: Bappeda
6. NGO atau pihak lain terkait

Tugas: memfasilitasi penyelenggara SSD dlm menyelenggarakan SSD sesuai dengan tingkat kewenangan Pemda

Sekretariat SSD Tingkat Prov dan Kab/Kota

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

1. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum SSD; dan
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum SSD.



ASPEK	TAHAPAN			
	PERENCANAAN	PENGUMPULAN DATA	PEMERIKSAAN DATA	PENYEBARLUASAN DATA
Pelaksana/PIC	Walidata	Produsen Data	Walidata	Walidata
Pelaksana Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembina Data 2. Produsen Data 3. Walidata Pendukung 4. Sekretariat Data 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Walidata 2. Walidata Pendukung 3. Pembina Data 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembina Data 2. Produsen Data 3. Walidata Pendukung 4. Sekretariat Data 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembina Data 2. Walidata Pendukung 3. Produsen Data 4. Sekretariat Data
Kegiatan	Forum Perencanaan Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan Produk Administrasi 2. Survey 	Forum Pemeriksaan Data	Forum SSD menyelenggarakan rapat pengesahan penyebaran data
Substansi Kegiatan	<p>Penyepakatan Terhadap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Data SSD terpilih yang akan dikumpulkan 2. Produsen Data SSD untuk masing-masing Data 3. Jadwal pengumpulan dan pemeriksaan Data SSD 4. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data SSD untuk disebarluaskan 	<p>Penyesuaian kegiatan pengumpulan data berdasarkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Data 2. Metadata 3. Rekomendasi Pelaksanaan Survey 	<p>Penyusunan Berita Acara yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan bahwa data SSD yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data SSD sesuai dengan berita acara perencanaan pengumpulan Data SSD; 2. Pernyataan bahwa data SSD yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data SSD tingkat Daerah sesuai dengan Prinsip SDI; dan 3. Pernyataan bahwa data SSD yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data SSD tingkat Daerah dapat dipertanggungjawabkan. 	<p>Penyusunan Berita Acara Penyebarluasan Data yang memuat substansi bahwa data yang akan disebarluaskan telah disepakati oleh Penyelenggara SSD dan sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia</p>
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Perencanaan Data 2. Dokumen Pengajuan Survey ke BPS 3. Rekomendasi Pelaksanaan Survey 	Data hasil pengumpulan	Berita Acara Hasil Pemeriksaan Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Penyebarluasan Data 2. Profil SSD
Waktu	M-1 Februari	Sesuai perencanaan data	Sesuai perencanaan data dan/atau Paling lama sebelum Ranc. RKPD Tahun berikutnya disusun	Paling lama sebelum Ranc. Akhir RKPD Tahun berikutnya disusun



KETERKAITAN DSSD DENGAN PENYELENGGARAAN SSD

PENYELENGGARAAN SSD

Daftar Data SSD (Kepmendagri)

- Data SSD Induk
(Data Sektoral Sesuai
Kebutuhan
Nomenklatur/Pemuktahiran)
- Data SSD Prioritas
(Data Sektoral sesuai target
nasional di RKP/K/L/SDI)

Data SSD Penugasan

- SPM
- SDGs
- Stunting
- Kemiskinan Extrim

Perencanaan

- Penanggungjawab : Walidata
- Pedoman : Daftar Data dan Format
Perencanaan Data
- Output : BA Hasil Perencanaan Data
dan dokumen serta rekomendasi
pelaksanaan survey

Pengumpulan

- Penanggungjawab : Produsen Data
- Pedoman : BA Hasil Perencanaan Data
- Output : Data Hasil Pengumpulan

Pemeriksaan

- Penanggungjawab : Walidata
- Pedoman : BA Hasil Perencanaan Data
dan Format Pemeriksaan Data
- Output : BA Hasil Pemeriksaan Data

Penyebarluasan

- Penanggungjawab : Walidata
- Pedoman : Struktur Profil Data SSD
- Output : BA Penyebarluasan Data dan
Profil Data SSD

Catatan:

- Seluruh proses melibatkan seluruh aktor Forum SSD sesuai
dengan tugas dan fungsinya
- Seluruh proses dilakukan dengan berbasis Sistem Informasi dalam
SISSD

**Profil Data Statistik
Sektoral Daerah
Dalam SISSD Yang
Sudah Dilegalkan
Oleh Kepala Daerah
Dan Dipublikasikan
ke SIPD secara
Nasional**



Contoh Daftar Data Statistik Sektor Urusan Pekerjaan Umum

Program Penyelenggaraan Jalan

No	SUB KEGIATAN	DATA STATISTIK SEKTORAL	SATUAN
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen
2	Pengelolaan Leger Jalan	Dokumen Leger Jalan	Dokumen
3	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan (Yang disurvey)	KM
4	Pembangunan Jalan	Panjang jalan (yang dibangun)	KM
5	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang jalan (standar yang dilebarkan)	KM
6	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang jalan (dilebarkanMenambah Jalur)	KM
7	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan (yang direkonstruksi)	KM
8	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan (yang direhabilitasi)	KM
9	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan (yang dipelihara berkala)	KM
10	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan (yang rutin dipelihara)	KM
11	Pembangunan Jembatan	Jembatan (yg terbangun)	Jembatan
12	Pembangunan Flyover	Flyover (yg terbangun)	Flyover
13	Pembangunan Underpass	Underpass (yang terbangun)	Underpass
14	Pembangunan Terowongan/Tunnel	Terowongan/Tunnel	Terowongan/Tunnel
15	Penggantian Jembatan	Jembatan (yang diganti)	Jembatan
16	Pelebaran Jembatan	Jembatan (yang dilebarkan)	Jembatan
17	Rehabilitasi Jembatan	Jembatan (yang direhab)	Jembatan
18	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jembatan (pemeliharaan rutin)	Jembatan
19	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jembatan (pemeliharaan berkala)	Jembatan
20	Pemantauan dan Evaluasi	Panjang Jalan (yg dipantau &	KM

Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM

No	SUB KEGIATAN	DATA STATISTIK SEKTORAL	SATUAN
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Minum	Dokumen
2	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen Rencana Teknis untuk konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen
3	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kapasitas Intake Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Liter/Detik
4	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kapasitas Intake Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Liter/Detik
5	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	off take Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	off take SPAM
6	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	SPAM
7	Fasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang melaksanakan Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kabupaten/Kota
8	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga
9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	SPAM
10	Survei dan Investigasi untuk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional/Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen Neraca Air	Dokumen



03

Pengembangan Proses Bisnis **Sistem Informasi Pembangunan Daerah**





eWalidata SSD



Data Perencanaan
Pembangunan Daerah



Perencanaan
Pembangunan Daerah



Analisa & Profil
Pembangunan Daerah



Meeting SIPD



Lapor Admin



Kemendagri & Kemenkeu Sepakat Integrasikan Sistem Informasi Dana Otsus dengan SIPD "Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dapat menyajikan informasi pemerintahan daerah, termasuk informasi keuangan daerah"

Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri

Meeting SIPD

Lapor Admin

Menu



SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

LOGIN KE SIPD DAERAH

eWalidata
SSD

01
0110
0001
01101

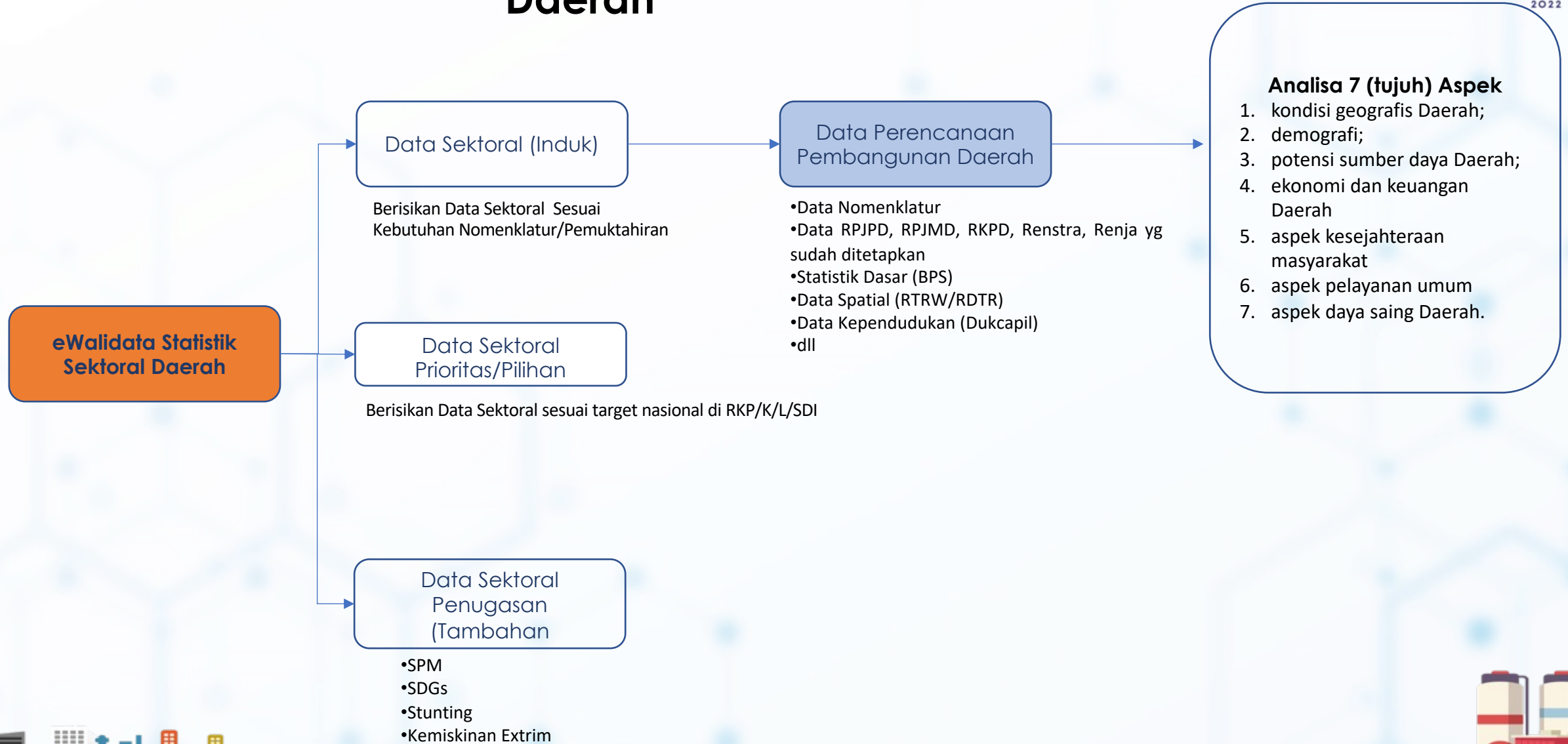
Data
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

Perencanaan
Pembangunan
Daerah

Analisa & Profil
Pembangunan
Daerah



Desain Tahapan eWalidata Statistik Sektor Daerah



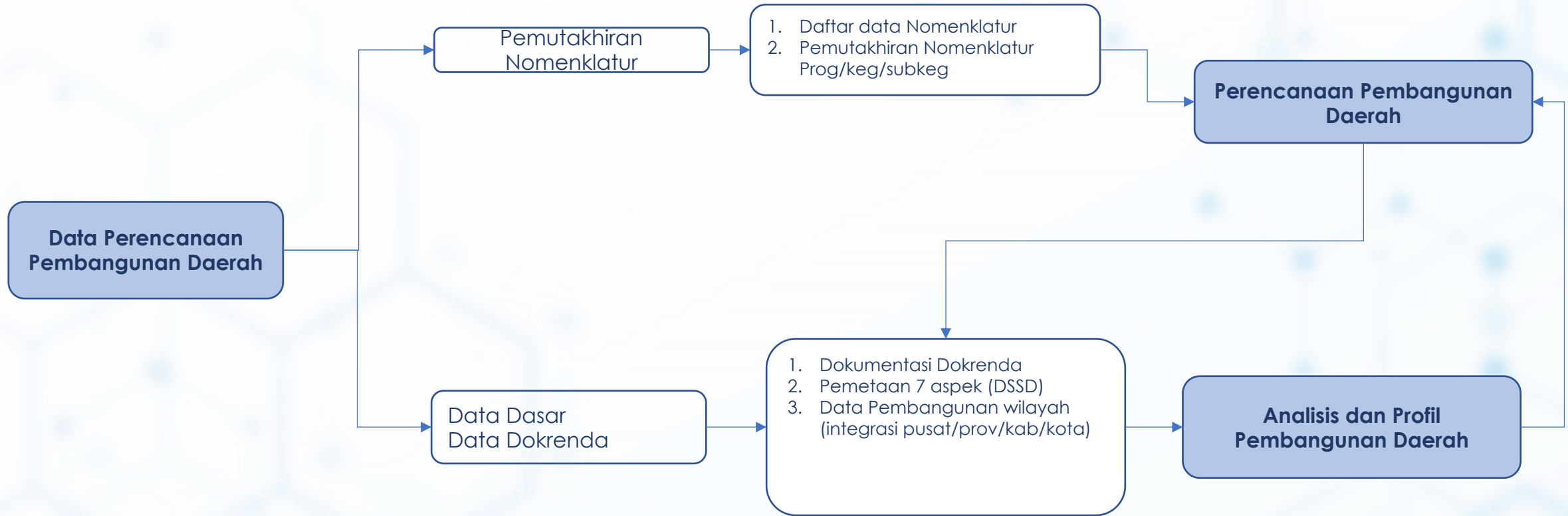


Desain Tahapan eWalidata Statistik Sektor Daerah

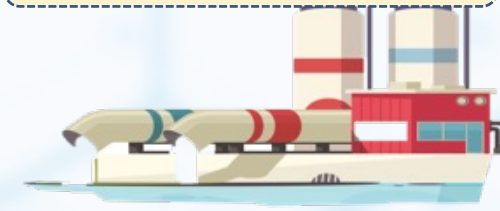




Desain Data Perencanaan Pembangunan Daerah SIPD

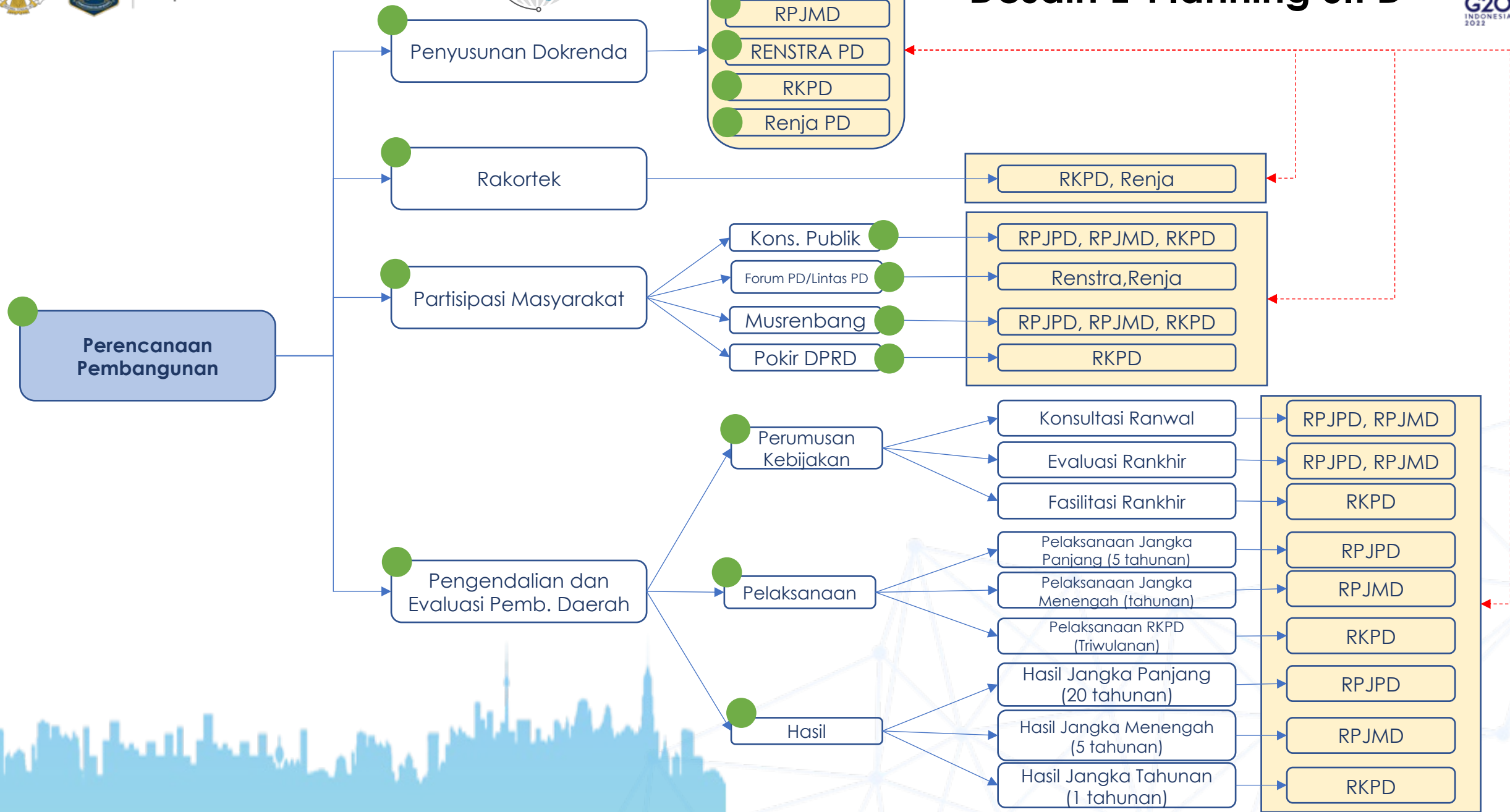


Bahan masukan penyusunan
Dokrenda



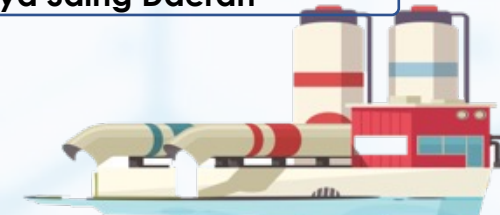
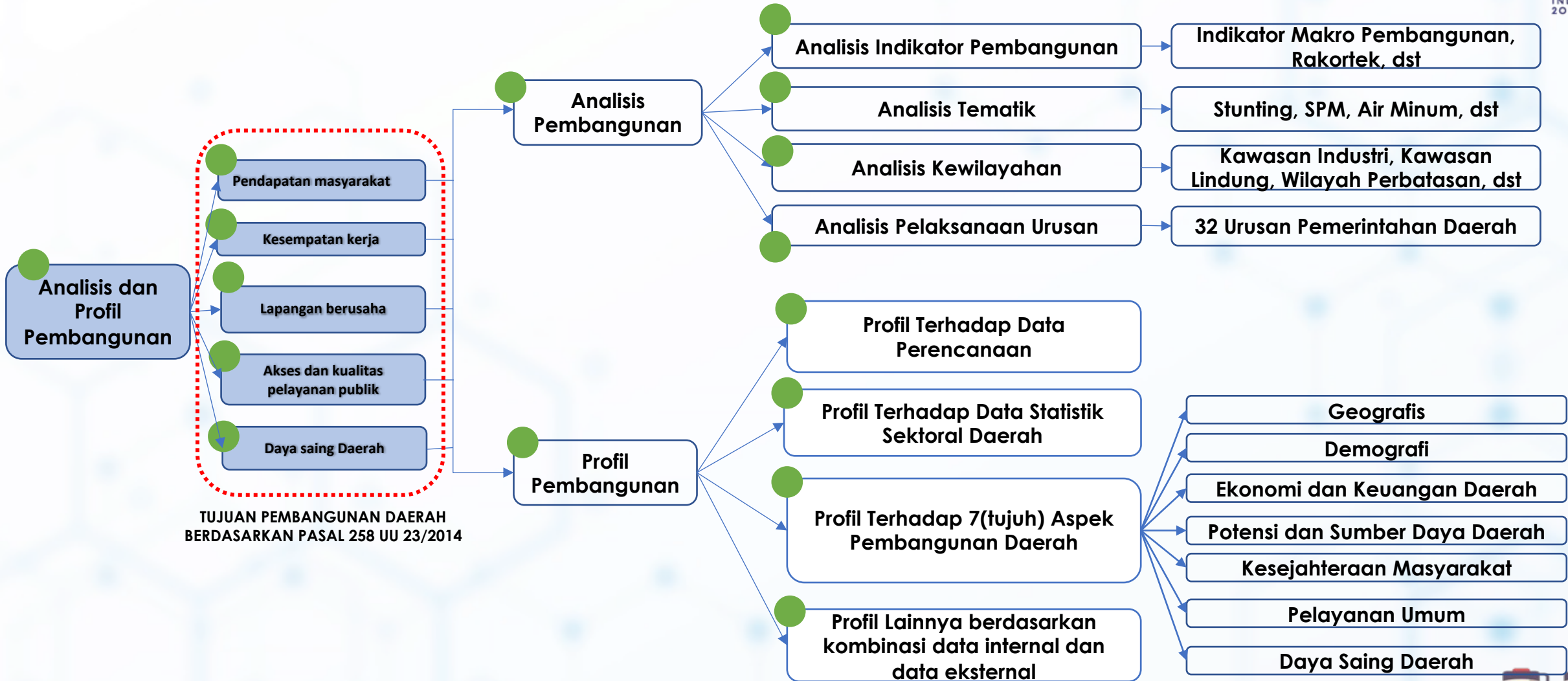


Desain E-Planning SIPD





Desain Analisis dan Profil Pembangunan Daerah





SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

eWALIDATA SSD

Meeting SIPD

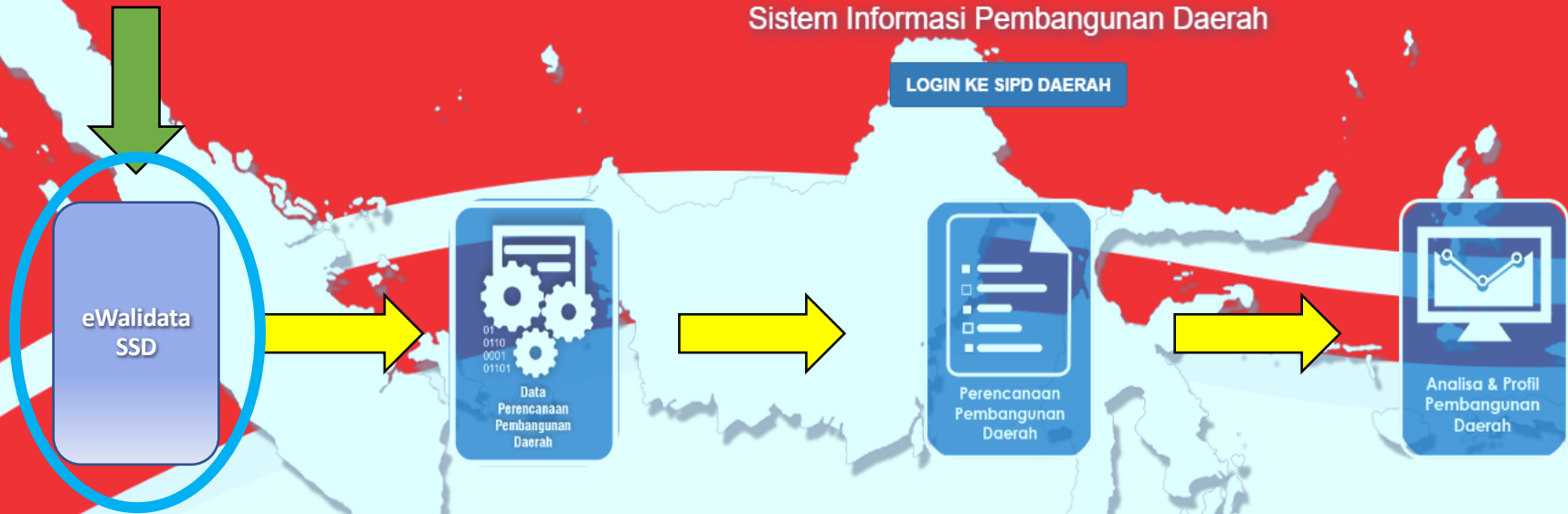
Lapor Admin

Menu



Sistem Informasi Pembangunan Daerah

LOGIN KE SIPD DAERAH



Login Pusat




Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia e-Walidata

Masuk ke Aplikasi

User ID Pemerintah Pusat

Password

Masuk

Login Daerah



Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia e-Walidata

Masuk ke Aplikasi

PROVINSI JAWA BARAT

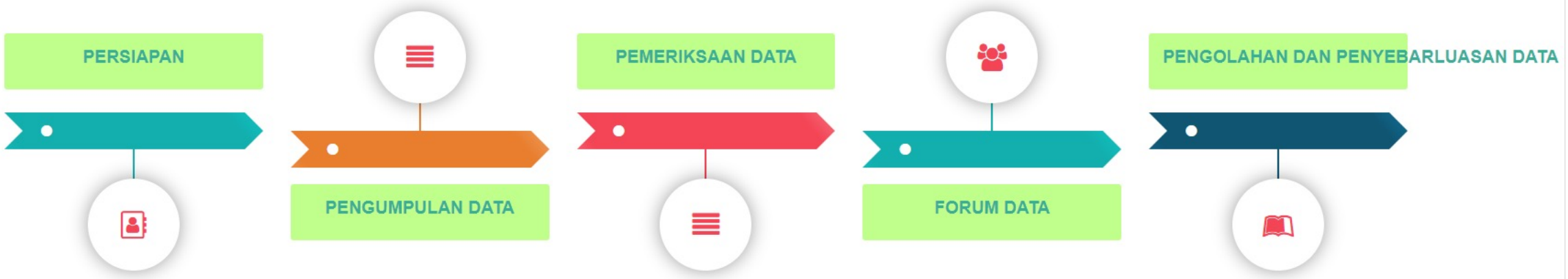
User ID Pemerintah Daerah

Username

Password

Masuk

Upload Dokumen





SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

**DATA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

Meeting SIPD

Lapor Admin

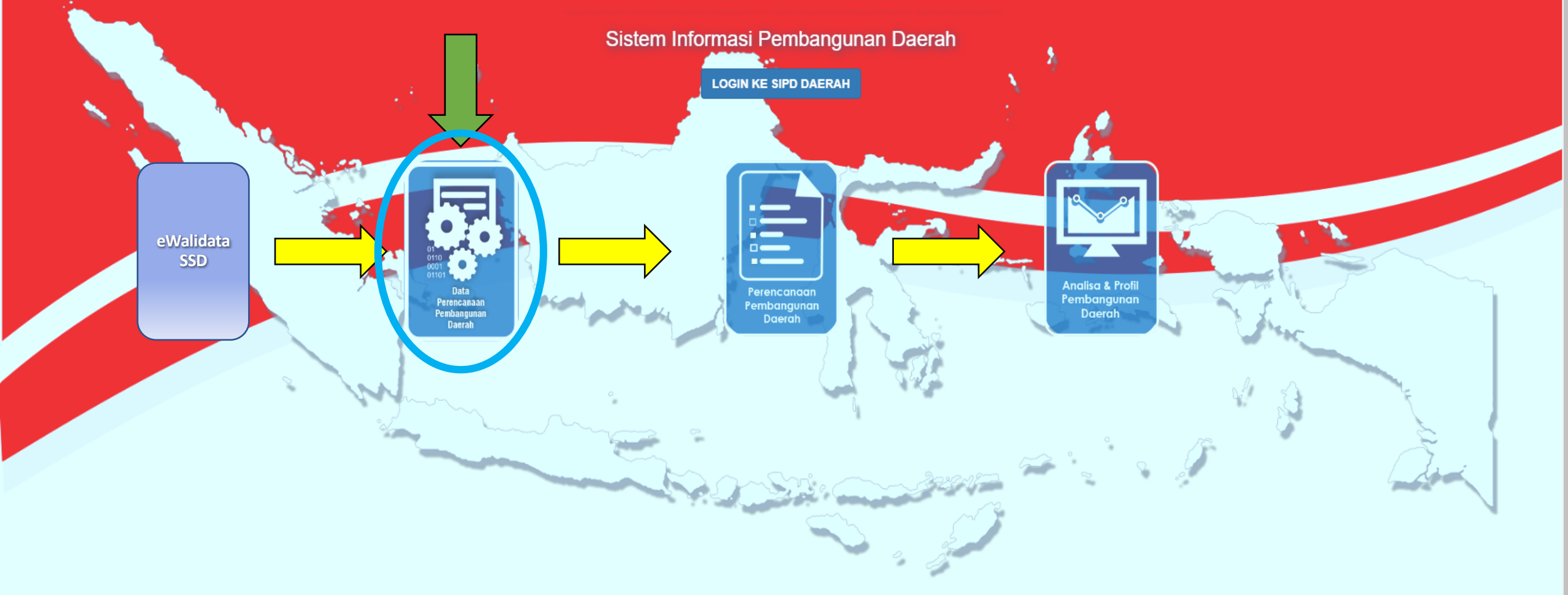
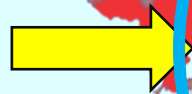
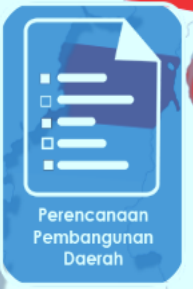
Menu



Sistem Informasi Pembangunan Daerah

LOGIN KE SIPD DAERAH

eWalidata
SSD



Login Pusat



Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Data Perencanaan Pembangunan Daerah

Masuk ke Aplikasi

User ID Pemerintah Pusat

Password

Masuk

[Kembali](#)

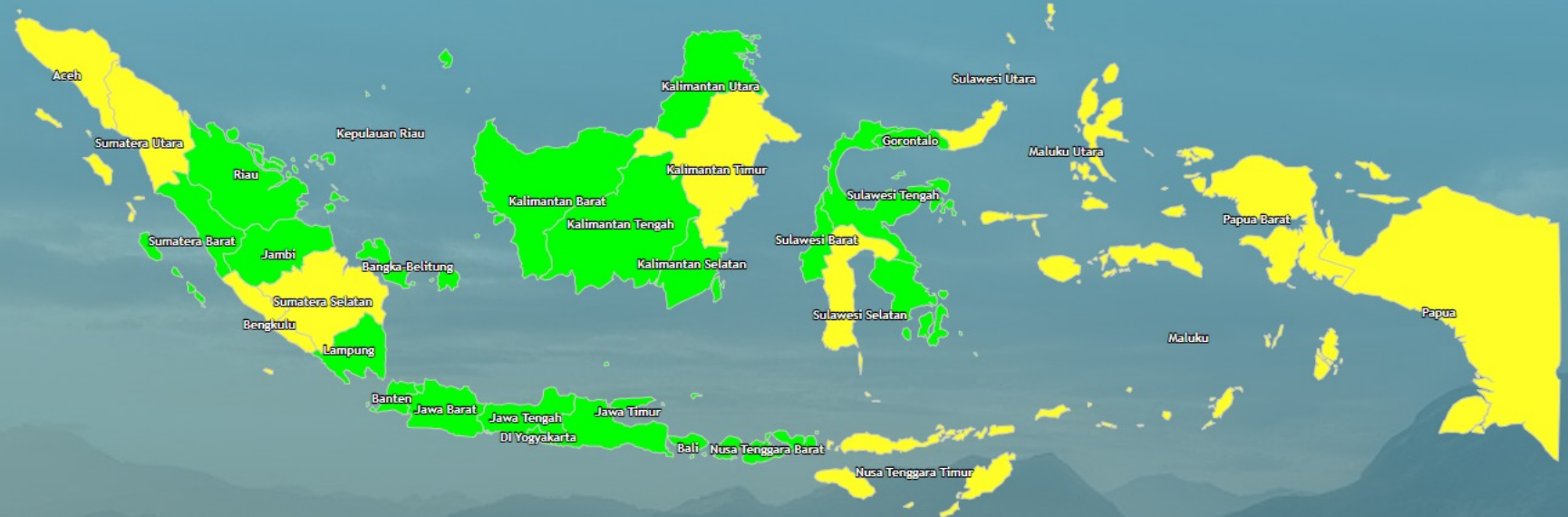


DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI

HOME » INTEGRASI E-PLANNING-RKPD

TAHUN 2023

Login Daerah



REKAPITULASI

PROVINSI	34 (100.00 %)
KABUPATEN	379 (91.33 %)
KOTA	87 (93.55 %)

* Rekapitulasi Ketersediaan Data Pemda di SIPD

	METODE PENGGUNAAN		
	INTEGRASI	INPUT LANGSUNG	BELUM PILIH METODE
PROVINSI	22	12	0
KABUPATEN	210	168	37
KOTA	57	30	6
TOTAL	289	210	43

LEGENDA

■	Pemda Telah Terintegrasi Seluruhnya
■	Pemda Telah Terintegrasi Sebagian
■	Belum Terintegrasi

* Metode Penggunaan Aplikasi SIPD berdasarkan metode yang dipilih oleh Pemda.
 Contoh : dari 34 Provinsi terdapat 26 Provinsi integrasi, 8 input langsung, dan 0 belum memilih metode penggunaan

Login Daerah



Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Data Perencanaan Pembangunan Daerah



PROVINSI JAWA BARAT

User ID Pemerintah Daerah

admin

Password

.....



Masuk

[Kembali](#)

Dashboard JAWA BARAT

Integrasi	RPJ/D	RPJMD	RKPD 2020	RKPD 2021	RENSTRA PD	RENJA PD	PERDA RPJMD	PERKADA RKPD	DATA KOR	DATA INDIKATOR KINERJA URUSAN
		E-Planning 1 E-Datase 1	E-Planning 10 E-Datase 2	E-Planning 18 E-Datase 2					90% (117131)	0% (0/322)

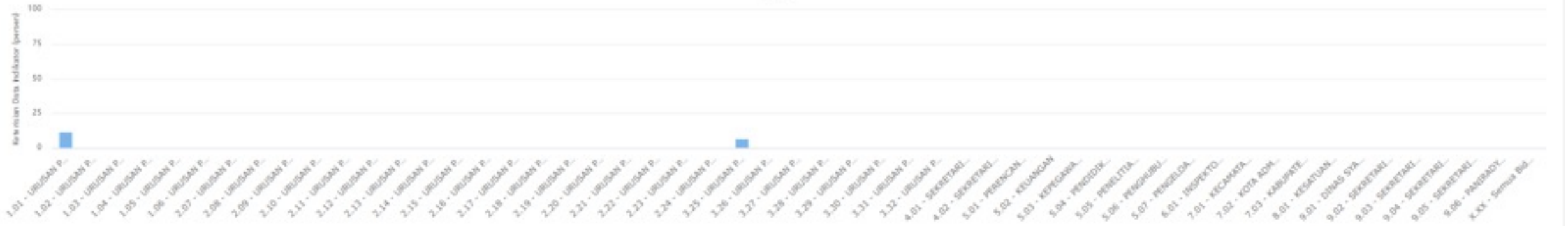
Total data sebanyak 1, menampilkan range data dari (1 - 1)

Keterangan Data Indikator Kinerja Urusan

Klik pada url bidang dan / atau batang grafik untuk melihat detail keterangan bidang

Keterangan Data Indikator Kinerja Urusan

PROVING

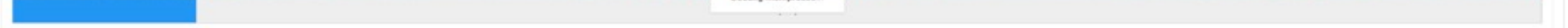


Urusan

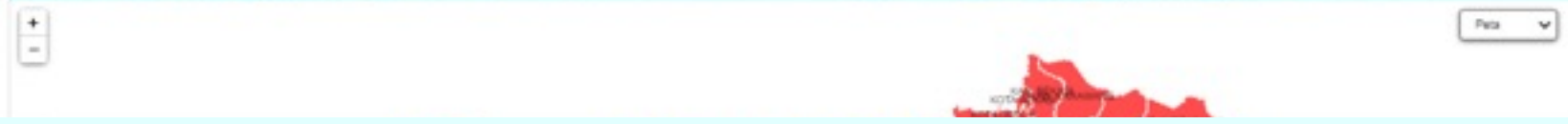
Tahun

Pilih Tahun

Prosentase Keterangan Data Indikator Kinerja Urusan 200 JAWA BARAT



Peta RTRW



Ringkasan Profil





SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Meeting SIPD

Lapor Admin

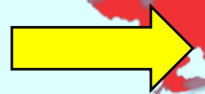
Menu



Sistem Informasi Pembangunan Daerah

LOGIN KE SIPD DAERAH

eWalidata
SSD



01
0110
0001
01101

Data
Perencanaan
Pembangunan
Daerah



Perencanaan
Pembangunan
Daerah



Analisa & Profil
Pembangunan
Daerah



Meeting SIPD



Lapor Admin



Menu



PROVINSI JAWA BARAT

Login Daerah

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

RAKORTEK

MONITORING,
PENGENDALIAN
DAN EVALUASI

RPJPD

RPJMD

RKPD

RKPDP

RENSTRA
PD

RENJA PD



SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

ANALISA DAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH

Meeting SIPD

Lapor Admin

Menu



Sistem Informasi Pembangunan Daerah

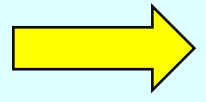
LOGIN KE SIPD DAERAH

eWalidata
SSD



01
0110
0001
01101

Data
Perencanaan
Pembangunan
Daerah



Perencanaan
Pembangunan
Daerah



Analisa & Profil
Pembangunan
Daerah





DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SIPD » HOME » TINGKAT PROVINSI TAHUN 2020

Pengaturan

LEGENDA

5 Indikator Lebih Baik Dari Nasional
4 Indikator Lebih Baik Dari Nasional
3 Indikator Lebih Baik Dari Nasional
2 Indikator Lebih Baik Dari Nasional
1 Indikator Lebih Baik Dari Nasional



[Detail](#)
[Detail](#)
[Cetak PDF](#)
[Cetak Excel](#)
Tahun 2020

[Detail](#)
[Cetak PDF Tabel](#)
[Cetak Excel Tabel](#)

Indikator	Capaian Nasional
Laju Pertumbuhan Ekonomi	-3.48
Provinsi Tertinggi	MALUKU UTARA
Provinsi Terendah	BALI
Jumlah Provinsi diatas Rata - Rata	17
Jumlah Provinsi dibawah Rata - Rata	17
Indeks Pembangunan Manusia	71.94
Provinsi Tertinggi	DKI JAKARTA
Provinsi Terendah	PAPUA
Jumlah Provinsi diatas Rata - Rata	19
Jumlah Provinsi dibawah Rata - Rata	15
Gini Rasio	0.38
Provinsi Tertinggi	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Provinsi Terendah	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jumlah Provinsi diatas Rata - Rata	16
Jumlah Provinsi dibawah Rata - Rata	18
Tingkat Pengangguran Terbuka	7.07
Provinsi Tertinggi	DKI JAKARTA
Provinsi Terendah	SULAWESI BARAT
Jumlah Provinsi diatas Rata - Rata	14

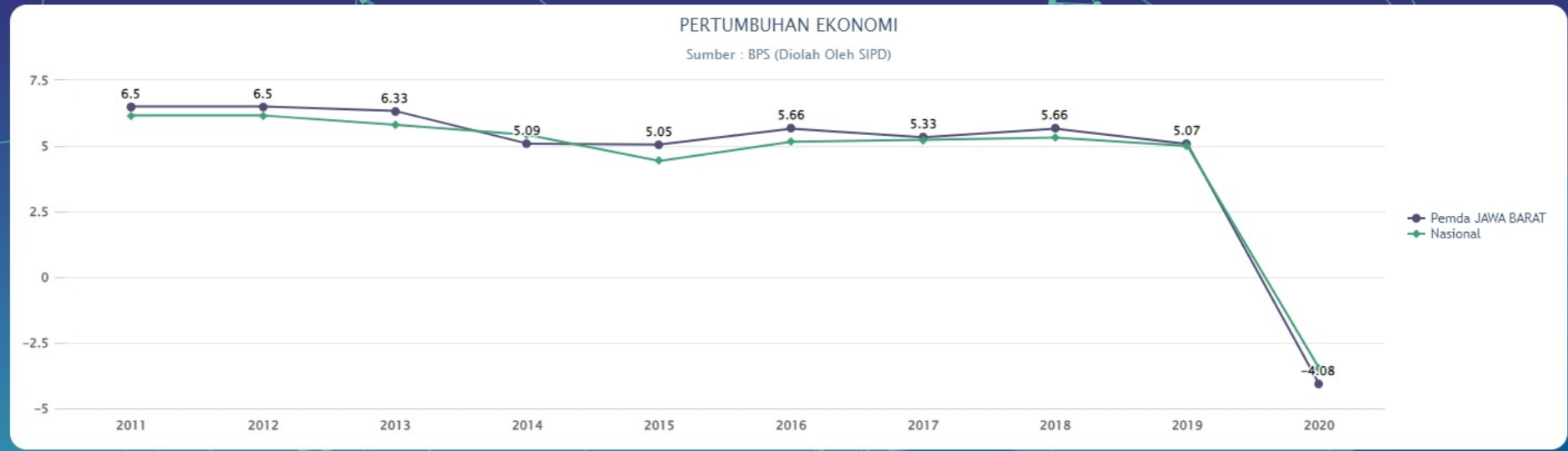


DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SIPD » HOME » LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI » DETAIL

Pilih Provinsi



JAWA BARAT





MENU UTAMA

Dashboard

Rekap

Informasi Pembangun...

PROVINSI

ACEH

SUMATERA UTARA

SUMATERA BARAT

RIAU

JAMBI

SUMATERA SELATAN

BENGKULU

LAMPUNG

KEPULAUAN BANGKA ...

KEPULAUAN RIAU

DKI JAKARTA

JAWA BARAT

Dashboard

Tahun 2022

Posisi Per-Provinsi Tahun: 2022

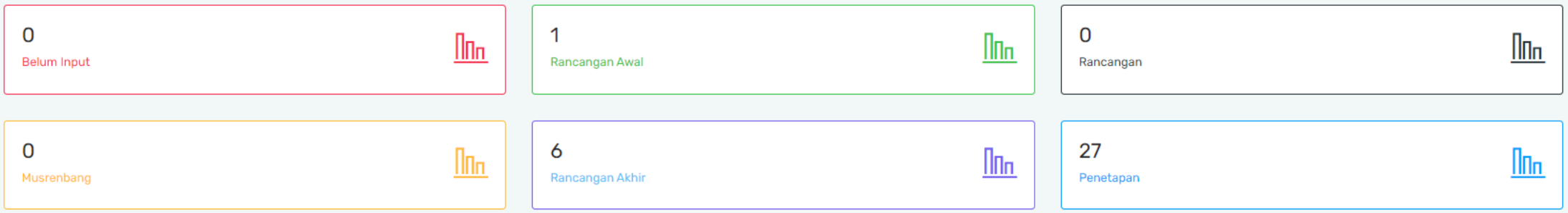
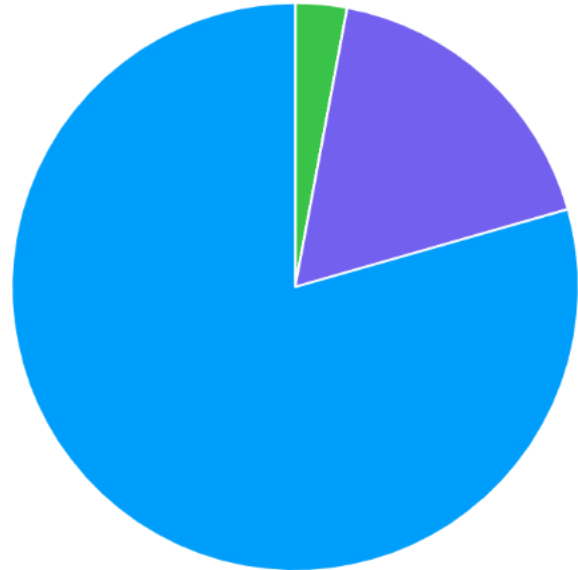


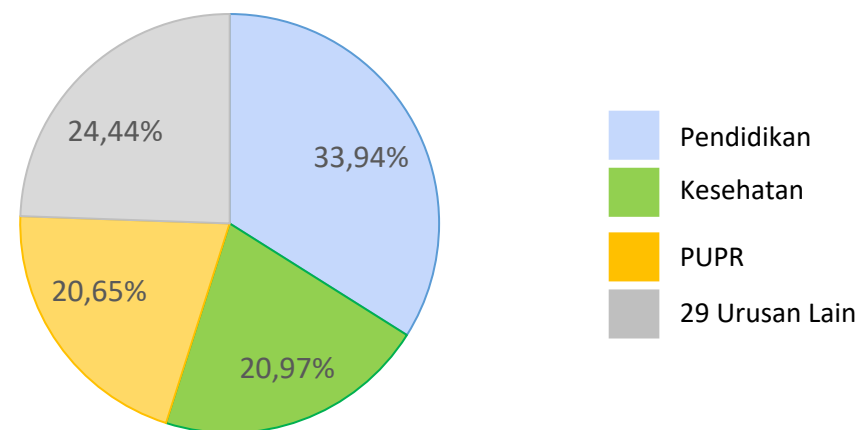
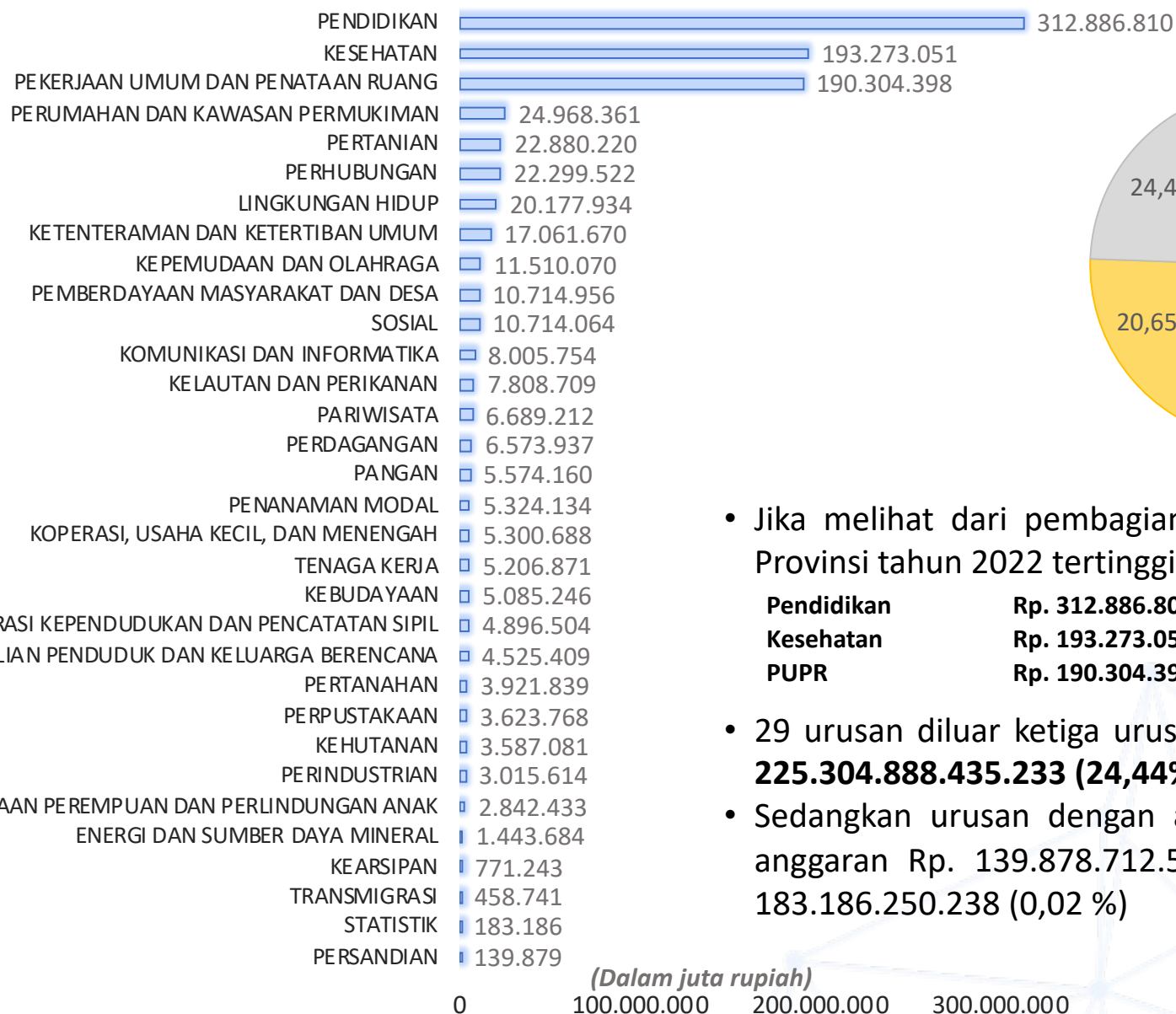
Chart Rekap Tahapan Per-Provinsi 2022

Legend: Belum Input (Red), Ranwal (Green), Rancangan (Black), Musrenbang (Orange), Rancangan Akhir (Purple), Penetapan (Blue)





Potret Anggaran Provinsi dalam RKPD 2022 Menurut Urusan Pemerintahan (Nasional)



- Jika melihat dari pembagian urusan pemerintahan, maka anggaran RKPD Provinsi tahun 2022 tertinggi didominasi oleh 3 urusan yakni:

Pendidikan	Rp. 312.886.809.998.695	(33,94%)
Kesehatan	Rp. 193.273.051.228.388	(20,97%)
PUPR	Rp. 190.304.397.771.906	(20,65%)
- 29 urusan diluar ketiga urusan tersebut hanya memiliki total anggaran **Rp. 225.304.888.435.233 (24,44%)**.
- Sedangkan urusan dengan anggaran terendah adalah Persandian dengan anggaran Rp. 139.878.712.592 (0,02 %) dan Statistik dengan anggaran 183.186.250.238 (0,02 %)



Dukungan Daerah Untuk Pemenuhan Prioritas Nasional Sektor Air Minum



Indikator 1: Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (SR) di Kabupaten/Kota



Prioritas kegiatan daerah untuk mendukung pemenuhan target akses air minum jaringan perpipaan, terdapat pada **Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (26 Kab/Kota, Rp.149,15 Milyar)**



Prioritas kedua diberikan pada sub kegiatan **Peningkatan SPAM jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (21 Kab/Kota, Rp. 110,89 Milyar)**



Prioritas ketiga diberikan pada sub kegiatan **Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (14 Kab/Kota, Rp. 56,38 Milyar)**



Sementara dukungan terendah untuk pencapaian target akses air minum jaringan perpipaan terdapat pada sub kegiatan **Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan (3 Kab/Kota, Rp. 1,1 Milyar)**

Sumber: SIPD Kemendagri, update 27 Juli 2022

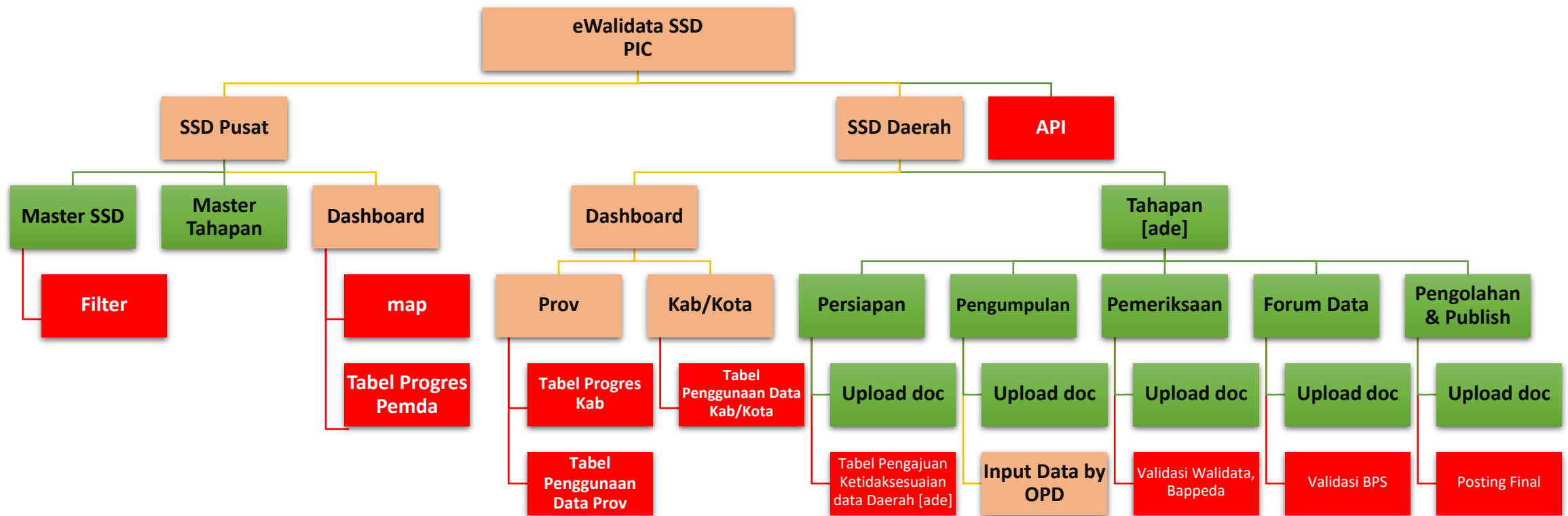


24 AGUSTUS 2022

PROGRES
PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI
PEMBANGUNAN
DAERAH



E-WALIDATA



MASTER DATA STATISTIK SEKTORAL

- Halaman ini berfungsi untuk mengatur list data yang tersedia dalam system
- Tindak lanjut pengembangan “filter” untuk mempermudah pengguna melihat list data pada sistem

Indikator Statistik Sektoral Daerah

+ Tambah

Menampilkan 50 data per halaman

Filter

Pencarian: Pula

No	Indikator Statistik Sektoral	Satuan	Cakupan					Publish	Aksi
			Nasional	Provinsi	Kabupaten	Kota	Kecamatan		
1	Rehabilitasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Ha	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	Jumlah Pulau	Pulau	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	Pengumpulan Dokumen	Dokumen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Total data sebanyak 3, menampilkan range data dari (1 - 3) (disaring dari 94 entri keseluruhan)

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Master Tahapan

- Halaman master ini berfungsi untuk mengatur tahapan-tahapan dalam pelaksanaan statistik sektoral daerah.
- Halaman ini dapat menyesuaikan kebutuhan dari Kemendagri guna menjaga fleksibilitas aturan yang akan ditetapkan kedepannya
- Tampilan hasil dari pembuatan tahapan DSSD di design dengan tampilan yang mudah dipahami oleh pengguna, baik pengguna daerah maupun pusat

data per halaman

Pencarian:

Urutan	Uraian	Icon
1	Persiapan »	
2	Pengumpulan Data »	
3	Pemeriksaan Data »	
4	Forum Data »	
5	Pengolahan dan Penyebarluasan Data »	

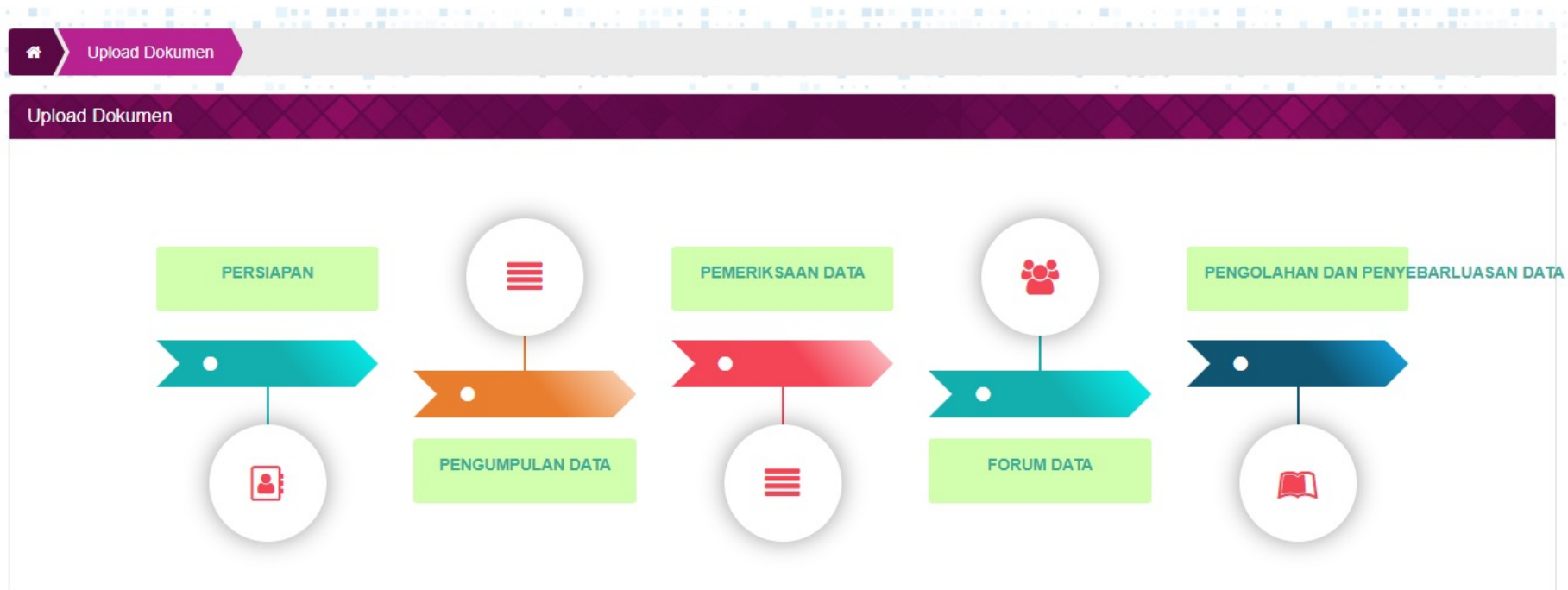
range data dari (1 - 5)

Sebelumnya



UPLOAD DOKUMEN

Halaman ini selain berfungsi sebagai informasi tahapan pelaksanaan, dapat digunakan juga sebagai alat untuk mengunggah dokumen-dokumen administrasi pelaksanaan Data Statistik Sektoral Daerah



Data Indikator Statistik Sektoral Daerah

Data Indikator Statistik Sektoral Daerah

ⓘ Tanda (...) titik untuk isian nilai indikator
 ⓘ Klik pada nilai indikator untuk mengubah

📍 Lokasi: 3402 - KAB. BANTUL

📅 Tahun Data (Menampilkan data dari tahun - tahun): 2017 - 2022

📄 Urusan:

⏴ Tampilkan **Filter** 📄 Excel

Menampilkan 50 data per halaman Pencarian:

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pulau	Pulau
2	Luas Kawasan Ruang Laut yang Dikelola	Km ²


PENGINPUTAN DATA [50%]

- Halaman ini berfungsi untuk produsen memasukkan data-data ke dalam aplikasi
- Progres saat ini sudah mencapai 50%
- Beberapa pengembangan yang akan diselesaikan dalam waktu dekat yakni testing aplikasi maupun pengembangan “filter” tampilan.

Pengolahan dan Penyebarluasan Data / Published Data [belum]

Home > Posting Data Statistik Sektoral Daerah Final

Posting Data Statistik Sektoral Daerah Final



Posting Data Statistik Sektoral Daerah Final

Proses

Nomor SK KDH	Tanggal SK KDH
75 Tahun 2020	Jumat, 17 Juli 2020

Pencarian: Menampilkan

Waktu	Username	Keterangan
Tidak ada data yang dapat ditampilkan		

Data Kosong

Urutkan klik kolom yang ada di tabel diatas untuk memilah data:

Chart Rekap Tahapan Kabupaten/Kota



LEGENDA CHART

Persiapan	508
Pengumpulan Data	2
Pemeriksaan Data	1
Forum Data	0
Pengolahan dan Penyebarluasan Data	0

Pencarian:

Chart Rekap Tahapan Provinsi



LEGENDA CHART

Persiapan	34
Pengumpulan Data	0
Pemeriksaan Data	0
Forum Data	0
Pengolahan dan Penyebarluasan Data	0

Chart Rekap Tahapan Semua Pemda



LEGENDA CHART

Persiapan	542
Pengumpulan Data	2
Pemeriksaan Data	1
Forum Data	0
Pengolahan dan Penyebarluasan Data	0

Menampilkan

data per halaman

No	Kode Pemda	Nama Pemda	Pagu	Progres	Aksi
1	1100	ACEH	0,00	✓ ○ ○ ○ ○ ○	   
2	1101	KAB. ACEH SELATAN	0,00	✓ ✓ ○ ○ ○ ○	   
3	1102	KAB. ACEH TENGGARA	0,00	✓ ✓ ✓ ○ ○ ○	   

Dashboard Pusat [belum]

- Halaman ini berfungsi untuk pusat memantau keterisian data daerah, baik dari sisi penginputan data ataupun unggahan dokumen administrasi

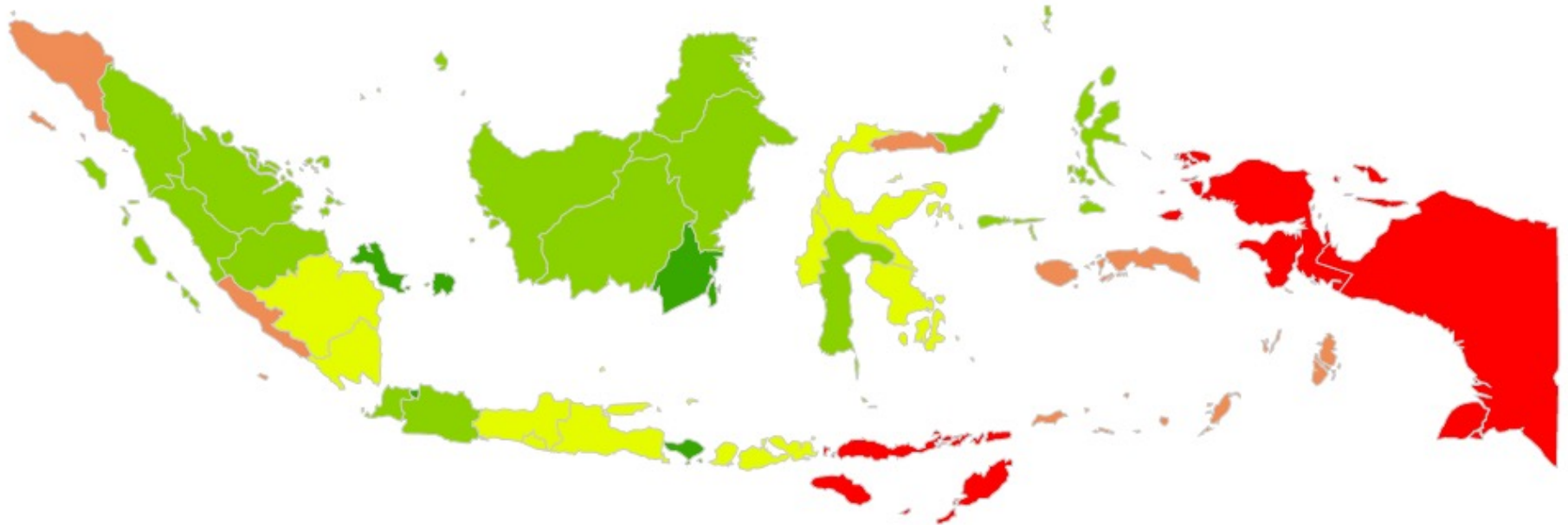
Provinsi Kota / Kabupaten

Jumlah Pulau V

Sumberdata : SSD Provinsi Tahun 2022

+
-

LEGENDA

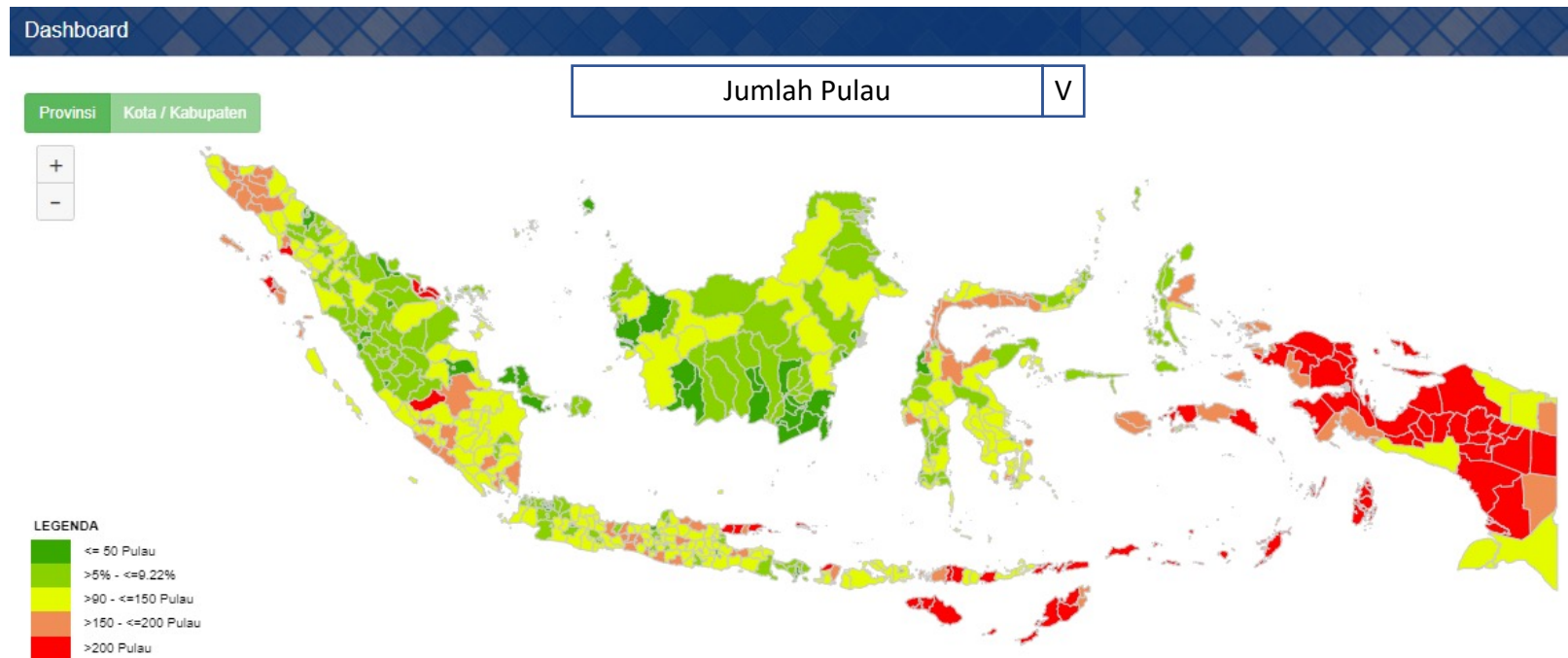


Published Data Prov
[belum]

- Halaman ini berfungsi sebagai gambaran hasil penginputan Provinsi yang telah di publikasi

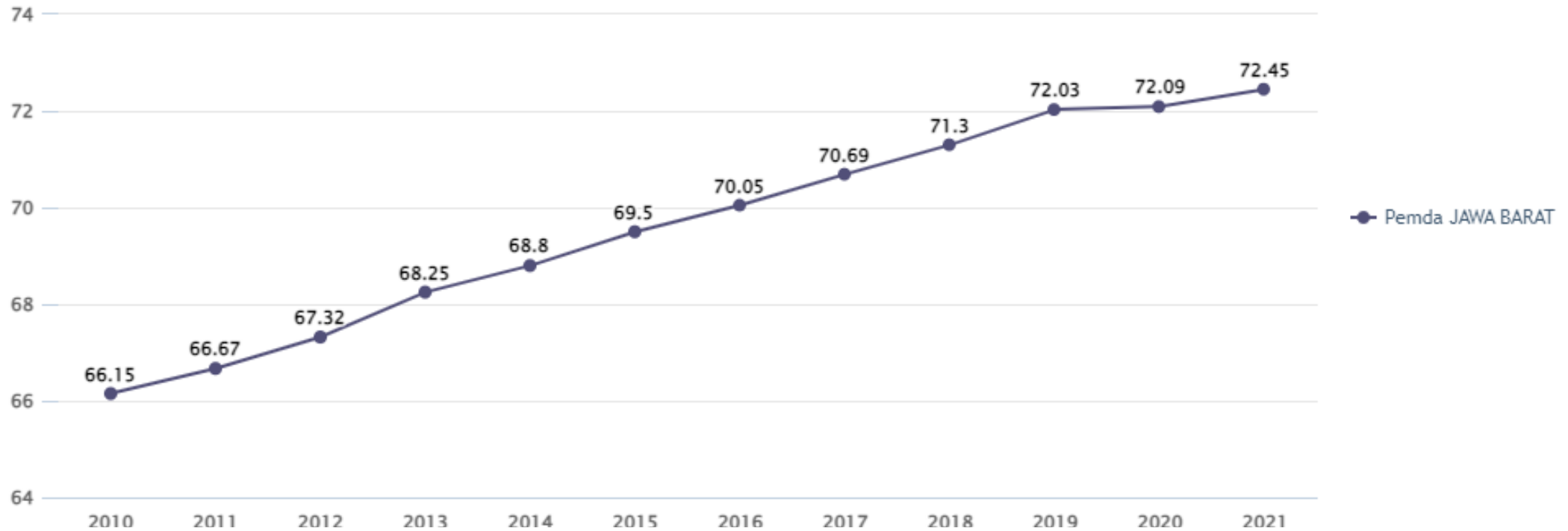
Published Data Kab/Kota [belum]

- Halaman ini berfungsi sebagai gambaran hasil penginputan Kabupaten/Kota yang telah di publikasi



Izin Usaha Perikanan

Sumber : SK Gubernur Jawa Barat No ... Tahun (SSD)



Map Publised Data
Detail [belum]

- Tampilan ini berfungsi untuk menampilkan data-data daerah yang telah di publikasi secara detail dalam bentuk grafik

Data Indikator Statistik Sektoral Daerah

ⓘ Tanda (...) titik untuk isian nilai indikator
 ⓘ Klik pada nilai indikator untuk mengubah

• Filter : - Tahun Data
 - Pemda - Urusan
 - SK KDH - OPD

▼ Tampilkan Excel

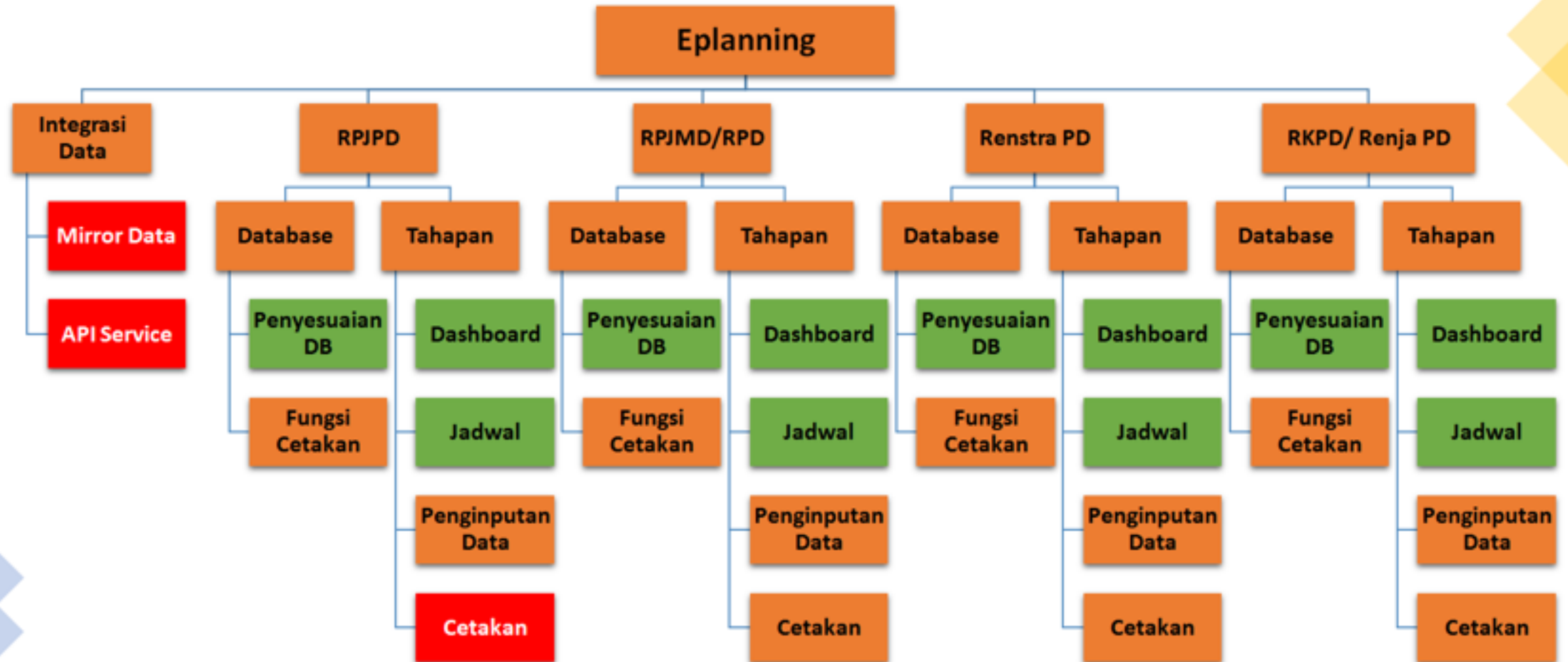
Menampilkan data per halaman Pencarian:

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pulau	Pulau
2	Luas Kawasan Ruang Laut yang Dikelola	Km ²

Published Data bentuk table [belum]

- Tampilan ini berfungsi untuk menampilkan data-data daerah yang telah di publikasi secara detail dalam bentuk table
- Dengan data berbentuk table, memudahkan pengguna daerah/umum untuk mengelola Kembali data-data yang sudah dipublikasi

PELAKSANA PENGEMBANGAN



PERMASALAHAN DATA DAN PERENCANAAN



Dikelola oleh bidang yang berbeda meskipun dalam satu instansi yang sama



Belum ada contoh dalam aturan yang secara langsung mengkaitkan data dan informasi dengan Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan



Keterisian data yang rendah dan ketidak tepatan sasaran perencanaan yang membuat permasalahan ini terus berulang

Tagging Data

Kode Tujuan Indikator:

Urai Tujuan Indikator:

*) Silahkan pilih salah satu data perencanaan

Sumber data perencanaan : Semua Sidara Edatabase Tutup Master Data

Pencarian: Menampilkan data per halaman

No	Data Perencanaan	Satuan
1 <input type="radio"/>	Pengumpulan Dokumen	Dokumen

Total data sebanyak 1, menampilkan range data dari (1 - 1)

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Tutup Simpan

GAMBARAN DATA DALAM PERENCANAAN

- Setiap penginputan Indikator kinerja pada Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan diberikan fitur tambahan untuk men-tag data.
- Data tersebut diambil dari berbagai sumber, baik dari eWalidata, edatabase, Sepakat, Simdasi BPS, dsb.

MANFAAT DARI TAGGING DATA

Dengan ter-taggingnya data pada setiap entitas perencanaan (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan) bisa memberikan feedback/informasi berupa:

- Pengguna Data
Terinformasi data-data apa saja yang dibutuhkan untuk menyusun dokumen perencanaan
- Pengguna Perencanaan
Dapat melihat nilai data secara langsung saat menyusun dokumen perencanaan, sehingga dapat menganalisa secara langsung kebutuhan target pada setiap entitas perencanaan



IMPLIKASI/*IMPACT*/PEMANFAATAN

- ✓ Kualitas Dokumen perencanaan yang dihasilkan meningkat seiring dengan pemanfaatan data perencanaan yang tepat.
(Indikator kinerja perencanaan didukung data perencanaan)
- ✓ Pemerintah Daerah akan merasa “perlu” dan “butuh” untuk mengisi data perencanaan dikarenakan sudah dapat terhubung dengan proses perencanaan
(Pemda merasa rugi tidak memanfaatkan fasilitas yang ada yang sudah terintegrasi dari data sampai dengan proses perencanaan)
- ✓ Kementerian Dalam Negeri memiliki basis data yang berkualitas terhadap identifikasi-identifikasi/relasi antara data perencanaan terhadap tujuan, sasaran s.d sub kegiatan
(berupa peta data terhadap entitas perencanaan)
- ✓ Hal ini dapat digunakan untuk analisis budgeting dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan relasi tagging data dan entitas dokumen perencanaan
- ✓ Dalam proses updating data perencanaan akan memiliki dasar yang kuat berdasarkan evaluasi perencanaan APBD termasuk dari sisi realisasi keuangan.
(dapat dibandingkan perubahan data terhadap budget yang telah direalisasikan maupun indikator pembangunan yang sudah dicapai)





e-Infodata DSD



Data Perencanaan
Pembangunan Daerah



Perencanaan
Pembangunan Daerah



Analisa & Profil
Pembangunan Daerah

TIME LINE IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH TERINTEGRASI

Penyempurnaan SIPD &
Pendampingan Pemda

2022

Implementasi SIPD untuk DSSD
& Perencanaan Pembangunan
Daerah 2024

2023

Implementasi SIPD untuk DSSD
& Perencanaan Pembangunan
Daerah 2025 Pilkada Serentak

2024

Implementasi SIPD untuk DSSD
& Perencanaan Pembangunan
Daerah 2026 Seterusnya

2025



Kemendagri & Kemenkeu Sepakat Integrasikan Sistem Informasi Dana Otas dengan SIPD "Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dapat menyajikan informasi pemerintahan daerah, termasuk informasi keuangan daerah"

Tiba Karnedjan, Menteri Dalam Negeri



Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



Terima

Kasih



www.kemendagri.go.id



Kemendagri_RI



Kemendagri



Kemendagri